



HASIL PENELITIAN PNBP

**MODAL SOSIAL DALAM FUNGSIONALITAS MASYARAKAT TRANSMIGRAN
BERDASARKAN POLA PENGUASAAN LAHAN DI DESA MARGA SAKTI KURO TIDUR
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

Oleh:

Dr. Yunilisiah, Dra., M.Si

Dr. Tamrin Bangsu, Drs., M.Si

Desy Afrita, AKS.,MP

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BENGKULU**

2017

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul : **Modal Sosial Dalam Fungsionalitas Masyarakat Transmigran Berdasarkan Pola Penguasaan Lahan Di Desa Marga Sakti Kuro Tidur Kabupaten Bengkulu Utara**

2. Ketua Pelaksana
 - a. Nama : Dr. Yunilisiah, Dra., M.Si
 - b. NIP : 196406261990012001
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - d. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 - e. Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
 - f. Universitas : Universitas Bengkulu
 - g. Bidang Keahlian : Kesejahteraan Sosial / Sosiologi Pedesaan
 - h. Alamat Kantor : Jl. WR. Supratman Fisip Universitas Bengkulu
 - i. Alamat Rumah/Telp. : Jl. Timur Indah 5 no.02 RT 32 RW2 Kota Bengkulu
HP. 0811731990

3. Personalia
 - a. Jumlah Anggota Peneliti : 3 orang
 - b. Jumlah Pembantu Pelaksana : 2 orang

4. Jangka Waktu Kegiatan : 4 bulan

5. Jumlah Biaya : Rp. 10 Juta
(Sepuluh Juta Rupiah)

Bengkulu, April 2017

Mengetahui,
Dekan FISIP Universitas Bengkulu

Ketua Peneliti,

Hasan Pribadi, Ph.D
NIP.195410121985031005

Dr. Yunilisiah, Dra., M.Si
NIP. 196406261990012001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Bengkulu

Dr. Ir. Abimayu Dipo Nusantara
NIP. 195612251986031003

ABSTRAK

MODAL SOSIAL DALAM FUNGSIONALITAS MASYARAKAT TRANSMIGRAN BERDASARKAN POLA PENGUASAAN LAHAN DI DESA MARGA SAKTI KURO TIDUR KABUPATEN BENGKULU UTARA

Penelitian ini memfokuskan modal sosial mendukung fungsionalitas masyarakat transmigran berdasarkan pola penguasaan lahan di desa Kuro Tidur Kabupaten Bengkulu Utara. Mereka telah menempati daerah tujuan ini selama 40 tahun dan sudah mengalami perubahan struktur penguasaan lahan. Pengumpulan data secara *partisipant-obsevation* melalui pengamatan langsung dan wawancara mendalam dan dokumentasi. Data dianalisis dengan model interaktif berdasarkan interpretasi kualitatif secara induktif dengan pendekatan emik. Hasil penelitian menemukan bahwa masyarakat transmigrasi memiliki perbedaan modal sosial dalam pelaksanaan fungsionalitas berdasarkan penguasaan lahan. Rumah tangga berlahan sempit dan tak berlahan kecenderungan tipe modal sosial *bonding* dalam melaksanakan fungsionalitas sosial berupa aksi sosial dan *bridging* lebih menekankan pola hubungan berdasarkan kekerabatan dan tempat tinggal serta tipe modal sosial *linking* berupa penguatan dalam kelompok swadaya. Rumah tangga berlahan luas tipe modal sosial *bonding* berupa kepedulian sosial dan unsur modal *bridging* adalah penguatan dalam partisipasi membangun integrasi sosial dalam kesatuan masyarakat transmigran. Sementara tipe modal sosial *linking* pada strata ini berupa kelompok sosial yang dikendalikan oleh elite desa.

Kata Kunci. Penguasaan Lahan, Modal Sosial Tipe *Bonding*, *Bridging*, *Linking*.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan struktur perekonomian bercorak agraris, maka masalah lahan merupakan salah satu hal penting untuk dibahas karena berimplementasi pada besaran pendapatan negara. Di samping itu, masalah lahan berkaitan dengan aspek “modal” (modal uang, pengetahuan, status sosial, jalur koneksi, politik, kekuasaan, dll). Akibatnya masalah lahan menjadi salah satu pemicu krisis sosial bahkan ketegangan sosial dan politik di daerah perkotaan maupun di pedesaan yang dapat mengganggu stabilitas.

Upaya menekan berbagai krisis sosial, ketegangan sosial dan politik sebagai akibat kerumitan dalam pemilikan dan penguasaan lahan negara dan penduduk, maka diundangkan dalam UUPA 1960. Di sisi lain tekanan penduduk semakin meningkat atas lahan pertanian dan pesatnya pembangunan yang memerlukan luas lahan yang tidak sedikit. Fenomena ini mengakibatkan pemilikan dan penguasaan lahan di Indonesia masih tidak merata, khususnya di pulau Jawa.

Di Jawa, rata-rata luas lahan yang dikelola rumah tangga petani cenderung menurun dari 0,68 ha (1963), 0,64 ha (1973), 0,58 ha (1983) 0,47 ha(1993), 0,41 ha (2003) dan 0,35 ha tahun 2013 (Sensus Pertanian seperti dikutip Thamrin, dalam Dewanta dkk., 2015). Penguasaan lahan yang timpang dapat menimbulkan distribusi perolehan pendapatan total yang semakin timpang bahkan terpolarisasi.

Terpolarisasinya pendapatan, akibat dari ketimpangan penguasaan lahan dikhawatirkan akan menimbulkan pertentangan antar kelas, stabilitas terganggu dan usaha pembangunan jangka panjang akan terhambat. Salah satu cara untuk menanggulangi ketidakseimbangan (kelangkaan) penguasaan lahan serta kesulitan ekonomi karena masih rendahnya perolehan pendapatan bagi petani sempit (gurem) dan tak berlahan (tunakisma) di Jawa adalah melalui program transmigrasi.

Program transmigrasi di Indonesia dimulai tahun 1905 yang diselenggarakan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Program kolonisasi tersebut diawali dengan pemindahan 155 keluarga petani dari Kedu (Jawa Tengah) ke Gedong Tataan, sebelah Selatan Way Sekampung, Lampung Selatan (Hardjono, 1982; Said Rusli, 1982).

Program kolonisasi itu (1905-1942) pada mulanya bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa dan menyediakan tenaga kerja perkebunan di luar Jawa, terutama perkebunan besar di pulau Sumatera. Menurut Undang-Undang Nomer 3 tahun 1972, tujuan program transmigrasi tidak lagi hanya semata-mata untuk memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah yang berpenduduk jarang, tetapi lebih menekankan peningkatan taraf hidup atau kualitas hidup transmigran. Kemudian amanat Undang-Undang Nomer 15 tahun 1997 beserta peraturan pelaksanaannya tentang Ketransmigrasian adalah meningkatkan kemampuan produktivitas masyarakat transmigran, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di pemukiman transmigran sehingga

ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan (Rencana Teknis Pembinaan Unit Pemempatan Transmigran Pelebai Kabupaten Rejang Lebong, 2010).

Di Provinsi Bengkulu penempatan transmigran dimulai tahun 1907 di desa Kemumu (Kustadi,1984). Pada tahun 1909, ditempatkan di Kepahiang sebanyak 963 Kepala Keluarga (3.892 jiwa). Program tersebut berlangsung sampai tahun 1935. Transmigran mulai ditempatkan kembali di Bengkulu Utara dan Rejang Lebong tahun 1951 sebanyak 1782 KK (6960 jiwa).

Program transmigrasi di Bengkulu mulai direncanakan secara sistematis sejak PELITA I hingga sekarang. Lokasi penempatan pemukiman transmigran di Provinsi Bengkulu meliputi 9 daerah kabupaten (Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Kapahiang, Kabupaten Lebong).

Penempatan transmigran 83 persen (125465 jiwa) ditempatkan di Bengkulu Utara, karena tingkat kepadatan penduduknya relatif masih rendah (36 orang/km). Per aturan Pemerintah (PP) No 23 tahun 1976 tentang perpindahan Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara dari Bengkulu Ke Arga Makmur dimana pemukiman transmigran sebagai tatanan kota.

Desa transmigrasi Marga Sakti (eks UPT Kuro Tidur), merupakan salah satu desa transmigrasi di Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Penempatan transmigran di desa itu pada tahun 1977 berjumlah 500 KK (346

KK asal Jawa Tengah, 153 KK dari Jawa Timur dan 2 KK dari Jawa Barat). Dalam kurun waktu 40 tahun terakhir (1977-2017), jumlah penduduk desa transmigrasi Marga Sakti mencapai 1825 (11.436 jiwa).

Perubahan jumlah penduduk di Desa Marga Sakti dalam kurun waktu 40 tahun diduga telah munculnya 'kembali' masalah ketimpanan penguasaan lahan dan perubahan struktur penguasaan lahan seperti halnya di pedesaan Jawa Jawa dan Kawasan Barat Indonesia. Penguasaan lahan sebagian besar terakumulasi pada sekelompok rumah tangga tertentu.

Perubahan penguasaan lahan pada warga transmigran, berhubungan dengan perubahan-perubahan dalam bidang fungsionalitas sosial kehidupan mereka. Hal ini disebabkan bahwa penguasaan lahan memiliki nilai sebagai asset, yang kemudiannya menentukan hubungan timbal balik antar lapisan sosial berdasarkan penguasaan lahan pada masyarakat yang bertujuan untuk mempertahankan fungsionalitas sosial.

Artinya persekutuan antar penguasaan lahan pada warga desa, tersusun dalam bentuk lapisan sosial yang terstratifikasi. Proses sosial antar lapisan sosial, membangun status sosial dan pola struktur sosial. Struktur itu menentukan dinamika relasi perbedaan antar lapisan sosial, yang memiliki tujuan dari tindakan, yaitu tanggungjawab pada pilihan-pilihan sumberdaya yang dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tanggungjawab tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan dasar dirinya sendiri, anggota keluarga dan kontribusi positif dalam masyarakat. Konsep ini menunjuk pada kapabilitas

individu atau kelompok mengacu pada cara mempertahankan fungsionalitas sosial yang dijalankan melalui peran-peran sosial di lingkungannya.

Fungsionalitas sosial antar lapisan sosial rumah tangga transmigran sebagai petani diperlukan jaringan sosial yang diintroduksi dengan sewa, bagi hasil dan maro bahkan mertelu. Kondisi ini tidak menjadi kendala antar petani dalam mempertahankan kedudukan mereka sebagai penerima pekerjaan dengan pemberi pekerjaan sepenuhnya. Fakta ini menjelaskan bahwa ada interaksi timbak balik antar lapisan sosial berdasarkan penguasaan lahan dalam mengakses sumberdaya untuk fungsionalitas sosial melalui kekuatan yang berupa modal sosial.

Modal sosial bisa terdapat pada tingkatan individu, kelompok sosial, organisasi, komunitas kelompok etnis hingga Negara (Coleman, 1988: Putnam, 1995: Portes 1998: Woolcok dan Sampson,1999: Nan-Lin:2001-2002). Kontribusi modal sosial dapat memberikan kekuatan dalam tatanan kehidupan warga masyarakat transmigran, karena modal sosial memiliki unsur nilai-nilai, norma dan aturan-aturan yang terletak dalam struktur sosial dan selanjutnya pada gilirannya struktur sosial, menuntun dan mengendalikan keseluruhan tindakan atau aktifitas yang terjadi pada upaya mempertahankan fungsionalitas sosial.

Jaringan hubungan kerjasama antar warga masyarakat yang terorganisasikan ini menjamin kelangsungan fungsionalitas sosial dan bahkan sekaligus memberi batas dan identifikasi diri sebagai satu kesatuan sosial tertentu. Dengan demikian, maka perspektif modal sosial yang berdasarkan pola

penguasaan lahan oleh warga transmigran dikaji berdasarkan manifestasi hubungan individu dalam keluarga atau kelompok, hubungan antar warga di komunitas dalam membangun fungsionalitas sosial. Pola hubungan tersebut diorganisir oleh ikatan (*bonding*), *bridging* dan *linking* yang memiliki tujuan tindakan sosial. Dengan demikian modal sosial dapat dijadikan sebagai sumberdaya (*resources*) dalam strategi memelihara fungsionalitas sosial yang berorientasi pada pengembangan masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut maka penekanan dalam penelitian ini adalah mengkaji modal sosial dalam fungsionalitas sosial berdasarkan pola penguasaan lahan pada warga transmigran. Selain itu belum ada penelitian mengenai masalah pola penguasaan lahan, padahal gejala-gejala sosial yang menyangkut penguasaan lahan di berbagai desa transmigrasi cenderung makin meningkat di Provinsi Bengkulu. Hal ini terkait dengan bertambahnya jumlah transmigran dan lajunya pertumbuhan rumah tangga di daerah transmigrasi yang memerlukan lahan untuk tempat pemukiman dan sumber produksi di lokasi pemukiman transmigran. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini dirumuskan dalam rumusan masalah.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka secara khusus penelitian ini ingin menjawab beberapa permasalahan pokok:

1. Bagaimanakah pola penguasaan lahan usahatani di desa transmigrasi Marga Sakti dalam kurun waktu 40 tahun terakhir (1977-2017)?

2. Bagaimana unsur-unsur modal sosial yang ada dalam hubungan antara sesama rumah tangga berdasarkan penguasaan lahan yang dapat disumbangkan pada proses fungsionalitas sosial ?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian pola penguasaan lahan dan kualitas hidup rumah tangga petani di desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara adalah:

Hasil studi penelitian kualitatif akan memberikan sumbangan yang diperlukan sebagai landasan dan arah bagi usaha pemahaman dan pemecahan masalah penguasaan lahan di desa transmigran dan dapat merupakan bahan kajian metodologis dikalangan akademisi, ilmu-ilmu sosial dan pengembangan masyarakat, sebagai bahan kajian ilmiah baik dalam konteks perkembangan ilmu murni maupun pengembangan ilmu terapan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mencabar teori modal sosial perspektif modal sosial secara konseptual melalui eksistensi dalam fungsionalitas sosial. State of The Art modal sosial dari hasil penelitian ini akan diupayakan dimuat pada jurnal internasional dengan Indeks Scopus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pendekatan Teori

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori pelapisan sosial (stratifikasi sosial) yang dikemukakan oleh berbagai ahli. Teori stratifikasi beranggapan bahwa pada setiap masyarakat pasti ditemukan sesuatu yang dihargai, maka barang sesuatu itu akan menjadi dasar sebagai pembeda masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat, yang menunjukkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat.

Teori stratifikasi sosial dari Weber sebenarnya perluasan konsep yang dikemukakan oleh Marx tentang kelas yang berkenaan dengan ekonomi, sosial dan politik, namun Weber membedakan dengan lebih tegas antara kelas dan status, menurut Weber (seperti dikutip Soekanto, 1983), konsepsi stratifikasi sosial meliputi class (kelas), status (kelompok status), party (partai-partai). Kelas merupakan stratifikasi sosial yang berdimensi ekonomi berupa produksi dan penguasaan. Status merupakan perwujudan stratifikasi sosial yang berkenaan pada prinsip-prinsip yang dianut pada masyarakat bersangkutan dalam mengkonsumsi “harta benda”, menyangkut gaya hidup (*life style*), kehormatan (*honour*) dan hak-hak istimewa (*privileges*). Party merupakan perkumpulan sosial yang berdimensi pada penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi tindakan masyarakat

Berdasarkan teori stratifikasi Weber, maka dasar menentukan kelas (lapisan masyarakat) pada suatu masyarakat diantaranya dapat berdasarkan ukuran pemilikan yang berkaitan dengan produksi. Maksud Weber, kelas itu mencakup orang yang memiliki peluang kehidupan yang sama dipandang dari sudut ekonomis, antara lain melalui pemilikan dan penguasaan lahan. Di daerah pedesaan, salah satu dasar pemilikan yang berkenaan dengan produksi (ekonomi) yang dianggap paling berharga adalah lahan, sehingga penguasaan lahan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pelapisan sosial.

2. Penguasaan Lahan

Warga transmigran merupakan masyarakat agraris yang tergantung dari pertanian dimana lahan merupakan faktor penentu bagi kelangsungan hidupnya. Disamping itu di kalangan penduduk pedesaan, lahan mempunyai kaitan dengan kedudukan ekonomi, sosial dan kekuasaan, bahkan dapat juga dipakai sebagai sumber yang strategis untuk mendapatkan kekayaan, pendapatan, kesempatan ekonomi dan politik (Wiradi dan White, 1997). Artinya pemilikan dan penguasaan lahan mempunyai pengaruh yang luas di dalam pembentukan struktur masyarakat yang pola hubungannya didasarkan atas pemilikan dan penguasaan lahan sebagai “aset” bernilai tinggi, terutama pada masyarakat pedesaan.

Distribusi luas penguasaan lahan di kalangan rumah tangga (RT) petani di pedesaan akan membentuk pola penguasaan lahan. Maksud penguasaan lahan adalah luas lahan yang dikuasai mengacu pada penguasaan yang efektif

(bukan pemilikan formal sebenarnya), berdasarkan hak milik, menyakep, menyewa, bagi hasil (Billah 1984, dalam Tjondronegoro dan Wiradi, 1984). Menurut Wiradi (1987), penyewa adalah rumah tangga petani yang menguasai lahan orang lain dengan sewa tetap, sedangkan penggarap adalah penguasaan lahan oleh rumah tangga tidak hanya berupa sewa tetap tetapi juga bagi hasil.

Menurut Kano (1987) penguasaan lahan di pedesaan dapat diklasifikasikan berdasarkan cara pengolahan lahan yakni; (1) semua lahan yang dimiliki di usahakan sendiri, (2) semua lahan diusahakan orang lain (sewa/ bagi hasil) dan (3) sebagian lahan diusahakan sendiri, sebagian yang lain diusahakan oleh orang lain (sewa/bagi hasil). Lahan yang dikuasai adalah jumlah lahan yang dimiliki ditambah luas lahan yang disakap dan luas lahan yang disewakan dikurangi dengan luas lahan yang disakepkan dan disewakan (Breman, 1992, seperti dikutip Sulasmono, 1994).

Berdasarkan pengertian konsepsi luas penguasaan lahan itu, maka luas penguasaan lahan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah luas penguasaan lahan sawah pada rumah tangga transmigran berdasarkan luas lahan sawah yang secara produktif diusahakan berdasarkan hak milik sendiri + (ditambah) yang disakap - (ditambah) bagi hasil + (ditambah) yang disewakan). Pelapisan masyarakat didasarkan pada luas lahan yang dikuasai, bukan atas dasar luas lahan yang dimiliki, karena lahan yang dikuasai menunjukkan luas lahan efektif yang sebenarnya diusahakan suatu rumah tangga sebagai sumber pendapatan. Artinya penguasaan lahan lebih menekankan pada

kesempatan untuk memanfaatkan secara produktif baik secara formal maupun non formal penguasaan atas lahan sawah dalam kurun waktu tertentu.

Perbedaan luas lahan yang dikuasai dapat mengakibatkan perbedaan status petani. Nasikun dan Triyono (1992) memberikan asumsi bahwa proses terjadinya perbedaan penguasaan luas lahan usahatani di antaranya berhubungan dengan status sosial (posisi relatif seseorang dalam masyarakat berdasarkan penghargaan sosial yang berkaitan dengan rasa hormat, hak istimewa dan prestise sosial) dan “modal”. Menurut Leach (seperti yang dikutip oleh Harjono, 1990), fragmentasi lahan terjadi karena jumlah penduduk meningkat dan dipersulit dengan terbatasnya pekerjaan luar pertanian. Artinya secara spesifik bahwa luas lahan yang dikuasai memberi sumbangan dalam kemampuan keluarga untuk mempertahankan fungsionalitas sosial.

3. Fungsionalitas Sosial

Fungsionalitas sosial adalah sebagai kemampuan seseorang, kelompok dalam melaksanakan keberfungsian sosialnya atau menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan status sosialnya (Wibawa, Raharjo dan Budiarti, 2010). Dengan kata lain bahwa fungsionalitas sosial itu merupakan kapabilitas seseorang atau kelompok menjalankan keberfungsian sosial.

Keberfungsian sosial mengacu pada cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah dan melaksanakan peran-sosial. Artinya keberfungsian sosial berkaitan

dengan pemenuhan tanggungjawab seseorang terhadap pihak lain, lingkungan terdekat dan diri sendiri (Miley, 1992 dalam Budi dkk, 2010)

Dengan demikian konsep ini menekankan aspek pola hubungan antar individu atau kelompok yang memiliki tujuan tindakan yaitu untuk mengakses sumberdaya, agar dapat melaksanakan keberfungsian sosial. Proses pelaksanaan keberfungsian sosial seseorang atau kelompok, diperlukan modal sosial sebagai unsur kekuatan untuk mengakses sumberdaya.

4. Modal Sosial (*Social Capital*)

Modal sosial didefinisikan secara sederhana adalah serangkaian nilai-nilai dan norma-norma yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok yang memungkinkan terjadinya kerjasama diantara mereka sebagai manusia dalam mencapai tujuan-tujuan bersama. Modal sosial dapat diinvestasikan, dikembangkan serta membutuhkan *maintenance* untuk pengembangannya. Karakteristik modal sosial inilah banyak berpengaruh pada praktek pengembangan masyarakat, terutama yang dikembangkan oleh banyak lembaga internasional seperti Bank Pembangunan Asia, World Bank.

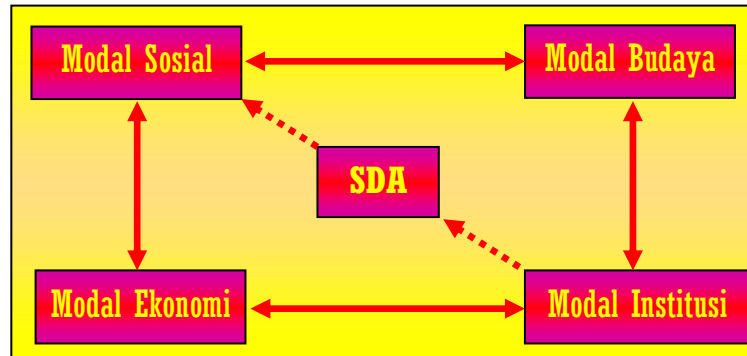
World Bank mendefinisikan modal sosial sebagai norma-norma dan hubungan sosial yang tertanam dalam suatu struktur sosial dan membuat seseorang atau aktor mampu mengkoordinasikan tindakan untuk meraih tujuan yang sesuai dengan keinginan (Cohen, 2001). Hal yang senada dikemukakan Coleman bahwa modal sosial adalah sumberdaya yang muncul secara permanen dalam struktur sosial

yang memfasilitasi beberapa fungsi dari aktor untuk mencapai mobilitas sosial (Coleman, 1990). Begitu pula ketika Bourdieu (1996) memperbaiki pandangannya dengan menyatakan bahwa modal sosial adalah sumberdaya yang aktual dan potensial bila diupayakan terus menerus oleh aktor dan aktor memiliki jaringan sosial yang terinstitusionalisasikan.

Bourdieu menjelaskan dengan tegas bahwa modal sosial sebagai “sumberdaya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang dengan keanggotaan dalam suatu kelompok yang masing-masing memberikan dukungan terhadap anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif. Dengan kata lain modal sosial dibangun berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik antar aktor sebagai keanggotaan dalam kelompok sosial.

Bourdieu juga menegaskan tentang modal sosial bukan hanya sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik modal ekonomi dan modal budaya, tetapi juga bentuk-bentuk *social capital* (modal sosial) berupa institusi lokal maupun kekayaan sumberdaya alamnya. Pendapatnya menegaskan tentang modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu seperti paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu.

Gambar 2.1 Hubungan Modal Sosial dengan Modal Ekonomi dan Modal Budaya.



Bourdieu selain memfokuskan modal sosial berdimensi individu, tetapi juga modal sosial pada tingkat kelompok. Bagi Bourdieu (1995) Modal sosial menggambarkan atribut dari seorang individu dalam sebuah konteks sosial. Orang dapat memperoleh modal sosial melalui tindakan-tindakan terarah dan dapat mengubah modal tersebut menjadi keuntungan ekonomi secara konvensional. Kemampuan untuk melakukannya, bagaimanapun, tergantung pada sifat kewajiban sosial, koneksi, dan jaringan yang tersedia bagi anda serta membangun posisi dalam struktur sosial.

Bourdieu memandang modal sosial terkait dengan bagaimana kekuasaan dan ketimpangan (*inequalities*) dihasilkan di dalam jejaring-jejaring sosial. Justru karena itu, Bourdieu juga menjelaskan bahwa modal sosial memberikan penekanan pada jejaring sosial (*social networks*) yang memberikan akses terhadap sumberdaya-sumberdaya kelompok. Dengan memiliki akses terhadap sumberdaya kelompok (*group resources*) diharapkan seorang individu pada akhirnya akan

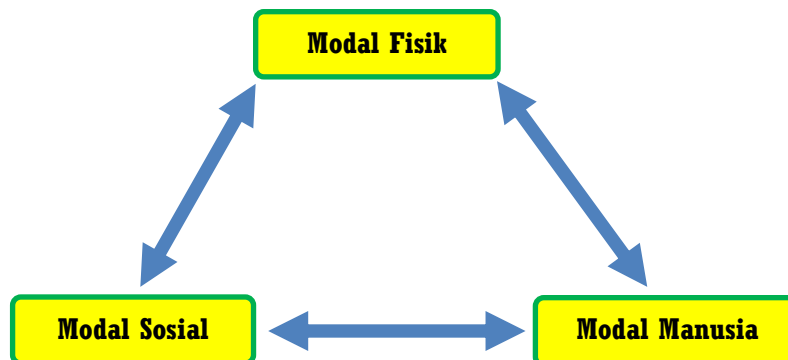
menikmati manfaat ekonomis. Bagi Bourdieu, manfaat ekonomis ini hanya akan dinikmati individu apabila ia secara terus-menerus terlibat dalam kelompok tersebut. Dalam konteks inilah, modal sosial dipahami sebagai sesuatu yang bersifat instrumental (pertukaran yang saling menguntungkan dan saling percaya).

Modal sosial penekanannya adalah sumberdaya yang diakses melalui hubungan sosial oleh aktor sebagai individu, kelompok, organisasi dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Formulasi modal sosial menurut Coleman (1988-1990) tidak bekerja sendiri melainkan modal sosial dapat dikembangkan berdasarkan modal manusia (*human capital*) dan modal fisik (*physical capital*). Lain hal dengan pemahaman tentang modal sosial yang dikemukakan oleh Coleman yang pada prinsipnya mengkritisi konsep Bourdieu tentang modal sosial. Coleman menyatakan faktor yang bekerja dalam dirinya sehingga orang tersebut menampilkan suatu tindakan tertentu dan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi perkembangan dirinya, berhubungan dengan modal sosial (tidak berwujud karena wujudnya dalam relasi diantara orang-orang), modal manusia (tidak berwujud, diwujudkan dalam keterampilan, pengetahuan yang diperoleh individu) dan modal fisik (berwujud jelas dalam bentuk materi yang dimiliki dan dikuasai) yang mungkin dimiliki atau yang dapat dikuasai atau dimanfaatkan seseorang dalam kegiatannya (Coleman, 1990:372-373).

Selanjutnya Coleman menjelaskan tentang kerangka konseptual "hubungan" antara modal manusia, modal fisik, dan modal sosial. Hubungan

antara ketiga modal tersebut adalah: (1) modal sosial dalam bentuk potensial, berupa struktur sosial dan hubungan sosial, akan diaktualisasikan apabila ada rasa percaya (*trust*) pada orang atau kelompok sosial lain akan potensi yang dimiliki orang tersebut berupa modal manusia dan modal fisik. Berarti formula modal manusia dan modal fisik merupakan dasar bagi aktualisasi modal sosial: (2) modal manusia dapat berkembang karena modal sosial, namun formulanya adalah modal fisik dan modal sosial. Artinya modal fisik dan modal sosial merupakan dasar bagi perkembangan modal manusia: (3) modal fisik dapat berkembang, bertahan, berfungsi dengan baik kalau didukung oleh modal manusia dan modal sosial. Tidak ada modal yang bekerja sendiri dalam realitas sosial yang sedang berlangsung (lihat gambar 2.2).

Gambar 2.2. Hubungan Modal Sosial, Modal Fisik dan Modal Manusia



Keterangan Gambar 2.2: Arah Modal Sosial menunjukkan arah hubungan yang saling mempengaruhi terhadap komponen modal manusia dan modal fisik

Coleman (1988 dan 1990: 95-120) melihat modal sosial sebagai sumberdaya sosial dan mendorong perilaku tertentu dalam kehidupan individu dan kelompok yang berkaitan dengan kewajiban dan harapan yang seimbang

dapat menumbuhkan kepercayaan. Kepercayaan sosial tumbuh dalam kehidupan asosiatif apabila obligasi dan *expectation* berjalan dengan baik. Dia mendefinisikan modal sosial sebagai “sesuatu yang memiliki dua ciri, yaitu (1) merupakan aspek dari struktur sosial (2) memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial tersebut.

Coleman mengartikan modal sosial tidak secara harfiah, melainkan berdasarkan konsep struktur sosial berdasarkan fungsinya tanpa memperhatikan perbedaan bentuk, penampilan dan susunan. Fungsi tersebut diidentifikasi berdasarkan konsep modal sosial sebagai sebuah nilai dari aspek struktur sosial dan bagi aktor dapat dipergunakan sebagai sumber dari apa yang dapat mereka gunakan untuk mencapai kepentingan/keinginan.

Aspek struktur sosial dapat dikemukakan oleh Coleman mengarah pada konsep modal sosial dalam bentuk keterlibatan dan harapan, potensi saluran informasi, norma dan sanksi efektif yang sesuai dan mendukung sikap tertentu dan ada dalam antar hubungan manusia, relasi wewenang, organisasi sosial yang dapat disesuaikan, organisasi disengaja yang bisa digunakan secara tepat dan melahirkan kontrak sosial. Dia menunjukkan bahwa struktur sosial dalam bentuk jaringan yang sifatnya lebih ketat dan relatif tertutup cenderung lebih efektif daripada yang terbuka. Sementara jaringan komunitas yang dikembangkan kelompok-kelompok perantau di berbagai daerah lazimnya dibuat eksklusif, yang keanggotaannya didasari relasi kekerabatan dan kesamaan daerah, bahasa, etnis, dan agama, dan mungkin karena ketertutupannya itulah mereka bisa *survive* dan

bisa menguasai jaringan perdagangan komoditas dan keterampilan tertentu. Ini menguatkan pandangan Weber dan Bourdieu tentang perlunya jaringan sosial bagi pemanfaatan ekonomi.

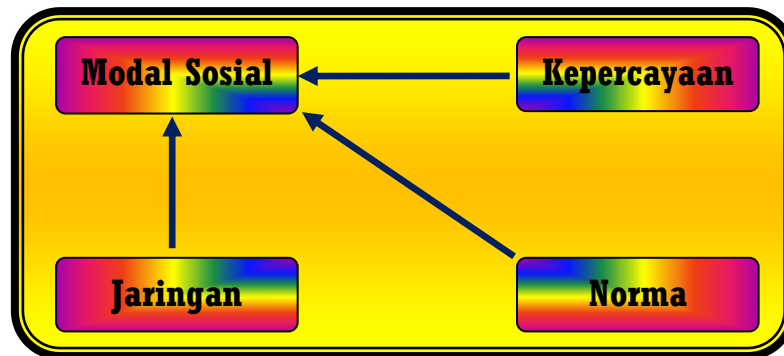
Coleman (1988-1990) mensejajarkan modal sosial dengan modal-modal lain. "*Social capital paralleling the concepts of financial capital (Modal materi), physical capital (modal fisik) and human capital (modal manusia), but embodied in relations among persons*). Bagi Coleman, modal sosial memiliki tiga bentuk: (1) pertama, kewajiban dan harapan (*obligation and expectation*) yang didasarkan pada keterpercayaan (*trustworthiness*) lingkungan sosial: (2) kedua, kapasitas aliran informasi struktur sosial atau jaringan sosial : dan (3) ketiga, norma-norma yang dijalankan dengan berbagai sanksi.

Coleman melihat modal sosial sebagai entitas yang berbeda, dengan dua elemen yang sama: mereka semua terdiri dari beberapa aspek struktur sosial yang memfasilitasi tindakan tertentu. Coleman menyatakan secara eksplisit bahwa "suatu bentuk modal sosial yang berharga dalam memfasilitasi tindakan tertentu mungkin akan berguna atau bahkan berbahaya bagi yang lain" (Coleman 1988: 598). Pada kenyataannya, beliau menjelaskan bahwa modal sosial tidak hanya berkaitan dengan struktur sosial pada umumnya tetapi juga berkaitan dengan norma-norma yang mengatur perilaku interpersonal. Sumber-sumber modal sosial itu muncul dalam bentuk tanggung jawab dan harapan-harapan yang tergantung pada kepercayaan lingkungan sosial, kemampuan aliran informasi dalam struktur

sosial dan norma-norma yang disertai sanksi (Coleman 1998 dalam Dasgupta dan Serageldin, 1999:13).

Studi pengulangan konsep modal sosial juga dilakukan oleh Putnam (1993). Dia mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai *mutual trust* (kepercayaan) antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial adalah sumberdaya yang secara permanen berada dalam struktur sosial dan memfasilitasi fungsi sebagai pilihan dari tindakan dan secara institusi sosial melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama.

Gambar 2.3 Unsur Modal Sosial



Hal ini juga mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya suatu *social networks* (“*networks of civic engagement*”) ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas komunitas. Bahkan lebih jauh, Putnam melonggarkan pemaknaan asosiasi horisontal, tidak hanya

yang memberi *desireable outcome* (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga *undesirable outcome* (hasil tambahan).

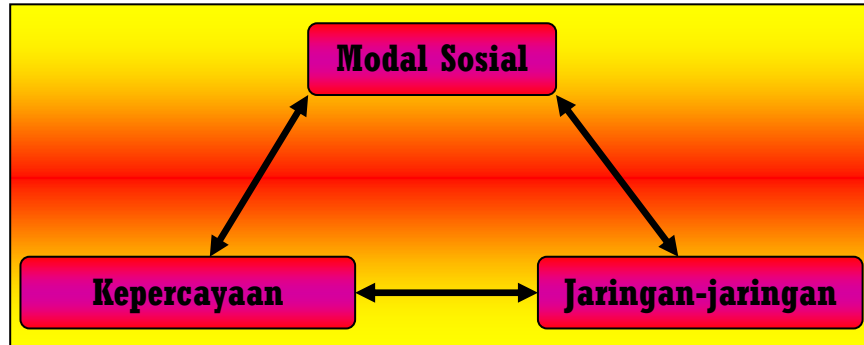
Kemudian salah satu tokoh utama yang sangat berpengaruh dalam pemikiran modal sosial yaitu Francis Fukuyama (1995). Fukuyama atas dasar studinya tentang negara secara ekonomis, menyatakan modal sosial sebagai *trust*, kemampuan orang-orang (masyarakat) bekerjasama untuk mencapai tujuan umum (*collective action*) dalam kelompok atau organisasi. Dengan demikian modal sosial memiliki peran yang sangat penting pada beberapa kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas.

Fukuyama juga mengatakan bahwa tidak semua norma, nilai, dan budaya secara bersama-sama dapat saling melengkapi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (*The Social Values and the creation of Prosperity*. New York: free Press, 1995: 20-26). Lebih lanjut dia dengan tegas menyatakan bahwa belum tentu norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak dan bertingkah-laku itu otomatis menjadi modal sosial, akan tetapi hanyalah norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dibangkitkan oleh kepercayaan (*trust*). Sama seperti halnya modal fisik dan modal finansial, modal sosial juga bisa menimbulkan dampak negatif. Dalam hal ini, Fukuyama mendefinisikan modal sosial adalah *trust* dimana aktor (individu, kelompok, masyarakat) bekerja sama untuk tujuan umum (*collective action*).

Fukuyama mengatakan bahwa modal sosial dibangun berdasarkan kepercayaan-kepercayaan antar individu. Rasa saling percaya dibentuk dalam waktu yang tidak sebentar serta memerlukan proses-proses sosial yang berliku. Argumen utama adalah menjelaskan bahwa peran *trust* (kepercayaan) adalah yang berharga menciptakan modal sosial, dalam proses pembangunan ekonomi di masyarakat. Pemahaman beliau bahwa ada masyarakat dan budaya yang tinggi dan rendah tingkat kepercayaannya. Masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi cenderung membangun modal sosial yang lebih baik, konsekuensinya menikmati perkembangan ekonomi yang baik, terutama dalam transisi menjadi negara ekonomi maju

Sama halnya dengan kepercayaan kelompok dan budaya yang tinggi mengakumulasi banyak modal sosial. Fukuyama mendefinisikan modal sosial berkaitan erat dengan konsep kepercayaan (*trust*). Artinya modal sosial adalah aktifitas organisasi sosial yang syarat dengan jaringan-jaringan dan kepercayaan memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dalam menciptakan keuntungan bersama semua anggota. Dalam pengertian ini modal sosial menekankan pentingnya transformasi dari hubungan sosial seperti pertetangga, pertemanan, atau kekeluargaan, menjadi hubungan yang bersifat jangka panjang yang diwarnai oleh perasaan kewajiban terhadap orang lain.

Gambar 2.4 Dimensi Modal Sosial



Menurut Putnam dan Fukuyama (Webstarmaster, 1998:6) konsep modal sosial tidak saja diterapkan pada tingkat individu, tetapi juga pada kelompok, komunitas bahkan nasional. Komunitas membangun modal sosial melalui pengembangan hubungan-hubungan aktif partisipasi demokrasi dan penguatan pemilikan komunitas dan kepercayaan. Selanjutnya Portes (1997) menyatakan bahwa modal sosial memiliki konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Konsekuensi positif: berupa sumber pengawasan sosial, sumber dukungan bagi keluarga, dan sumber manfaat sosial ekonomi melalui jaringan sosial luar. Sedangkan konsekuensi negatif berupa pembatasan peluang bagi pihak lain (eksklusifitas), pembatasan kebebasan individu klaim berlebihan atas keanggotaan kelompok, dan penyamarataan norma bagi semua anggota (kompormitas).

Sementara Woolcock (1998: 27, 151- 2110) membedakan tiga tipe modal sosial. (1) *Social Bounding*. Pengertian *social bounding* adalah nilai, kultur, persepsi dan tradisi atau adat-istiadat (*custom*), tipe modal sosial dengan

karakteristik adanya ikatan yang kuat (adanya perekat sosial) dalam suatu sistem kemasyarakatan. Misalnya, kebanyakan anggota keluarga mempunyai hubungan kekerabatan dengan keluarga yang lain yang mungkin masih berada dalam satu etnis.

Di sini masih berlaku adanya sistem kekerabatan dengan sistem klien. Di banyak daerah *klien* masih berlaku. Pengertian *klien* disini sangatlah berbeda maknanya dengan *leneage* kelompok kerabat unilateral yang masih bisa ditelusuri hubungannya saja, atau suku/*stam* (kesatuan tertinggi yang mempersatukan kelompok kerabat). *Klien* merupakan kelompok kerabat tradisional, unilateral dan eksogam. Disebut eksogam karena perkawinan dalam *klien* tidak dibenarkan. Unilateral karena garis keturunan diperhitungkan mulai garis patrilineal saja atau matrilineal saja. Tradisional karena *klien* juga meliputi warga atau kerabat yang tidak bisa lagi ditelusuri hubungannya.

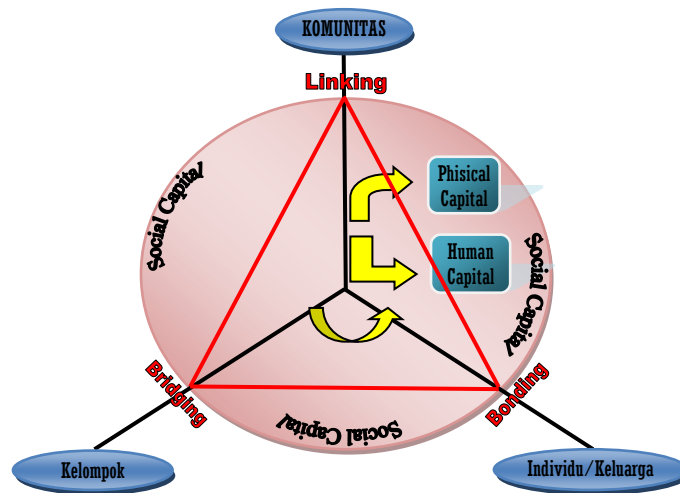
Hubungan kekerabatan ini bisa menyebabkan adanya rasa empati/kebersamaan. Bisa juga mewujudkan rasa simpati, rasa berkewajiban, rasa percaya, resiprositas, pengakuan timbal balik nilai kebudayaan yang mereka percaya.

Rule of law/aturan main merupakan aturan atau kesepakatan bersama dalam masyarakat, bentuk aturan ini bisa formal dengan sanksi yang jelas seperti aturan Undang-Undang. Namun ada juga sanksi non formal yang akan diberikan masyarakat kepada anggota masyarakatnya berupa pengucilan, rasa tidak hormat bahkan dianggap tidak ada dalam suatu lingkungan komunitasnya. Ini

menimbulkan ketakutan dari setiap anggota masyarakat yang tidak melaksanakan bagian dari tanggung jawabnya. Hal ini berakibat akan adanya *social order*/keteraturan dalam masyarakat. (2) *Social Bridging* (jembatan sosial), bisa berupa institusi maupun mekanisme merupakan suatu ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya. Ia bisa muncul karena adanya berbagai macam kelemahan yang ada disekitarnya sehingga mereka memutuskan untuk membangun suatu kekuatan dari kelemahan yang ada

Social Bridging bisa juga dilihat dengan adanya keterlibatan umum sebagai warga negara (*civic engagement*), asosiasi, dan jaringan. Tujuannya adalah mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat agar masyarakat mampu menggali dan memaksimalkan kekuatan yang mereka miliki baik SDM (Sumber Daya Manusia) dan SDA (Sumber Daya Alam) dapat dicapai. (3) *Social Linking* merupakan hubungan jaringan sosial dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat yang melibatkan dengan elite masyarakat (tokoh, elite politik, figure) sebagai orang yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi kelompok, aksi kolektifas serta pemberdayaan. Gambar 2.5 menjelaskan keterkaitan modal sosial dalam *bonding*, *bridging* dan *linking* yang bekerja tergantung pada keadaan.

Gambar 2.5. Keterkaitan Modal Sosial dengan *Bonding*, *Bridging* dan *Linking*



Pada dasarnya ketiga tipe modal sosial ini dapat bertahan bekerjanya tergantung dari keadaannya dalam dimensi (1) ikatan solidaritas dimana modal sosial menciptakan kohesi kelompok dalam keadaan merugi, (2) pertukaran timbak balik (*reciprocity transaction*) yaitu pranata yang melahirkan pertukaran antar para pelaku, (3) nilai luhur yaitu gagasan dan nilai, moral yang luhur dan komitmen melalui hubungan-hubungan kontraktual pencapaian tujuan individu di balik tujuan instrumental, (4) membina kepercayaan yaitu institusi formal dan kelompok informal/partikuler menggunakan mekanisme yang berbeda untuk menjamin pemenuhan kebutuhan berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan mekanisme rasional.

Keempat tipe modal sosial itu selalu terkait dengan penggunaan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk mempertahankan ketersediaan modal sosial dalam pemenuhan kebutuhan sesuai dengan tujuan tertentu yang bersifat timbal balik. Sumber modal sosial bersifat instrumental adalah pertukaran yang saling menguntungkan dan rasa saling percaya dan modal sosial bersifat *consummatory* yaitu nilai-nilai sosial budaya dasar dan solidaritas sosial.

Uraian Woolcock selanjutnya konsep modal sosial menjangkau aspek apa yang disebutnya sebagai "*embeddednes*"(kerekatan) dan "*autonomy*". Kerekatan pada tingkat mikro menunjuk pada ikatan-ikatan intra komunitas dan pada tingkat makro merujuk pada hubungan negara dan masyarakat.

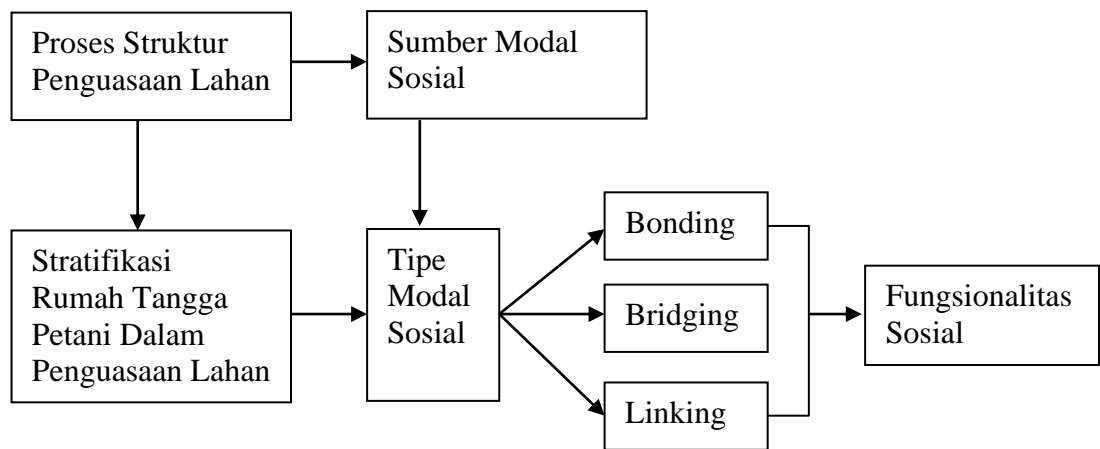
Otonomi pada tingkat mikro merujuk pada jaringan antar kelompok atau komunitas dan pada tingkat makro pada pengembangan kapasitas dan kredibilitas. Pendekatan modal sosial untuk memahami fungsionalitas berdasarkan pola penguasaan lahan menggunakan pendekatan modal sosial Woolcock.

5. Peta Jalan Penelitian

Penelitian ini mengkaji modal sosial antar rumah tangga berdasarkan luas penguasaan lahan. Struktur luas penguasaan lahan sebagai asset berpotensi dimanfaatkan untuk membantu bernegosiasi dalam proses pencapaian tujuan dari tindakan sosial. Salah satu asset berpotensi yang ada dalam struktur penguasaan lahan adalah modal sosial. Hal ini disebabkan bahwa luas penguasaan lahan memiliki arti penting pada dimensi terbentuknya stratifikasi sosial dan kemudian

menentukan tingkat sumberdaya modal sosial. Secara umum modal sosial merujuk pada rasa saling percaya (trust), norma sosial, nilai-nilai sosial, jaringan sosial, pertukaran sosial dan kohesifitas sosial. Klasifikasi sumberdaya tersebut berupa bonding, bridging dan linking adalah komponen yang sangat penting dalam proses pencapaian fungsionalitas masyarakat transmigran pada kehidupan sosial (lihat gambar 2.6).

Gambar 2.6. Peta Jalan Penelitian / Road Maap Penelitian



BAB III. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Batasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif adalah sebuah desain penelitian yang bersifat terbuka dengan kondisi dilapangan. Konstentrasi penelitian adalah modala sosial dalam fungsionalitas berdasarkan penguasaan lahan pada warga transmigran di Kabupaten Bengkulu Utara. Unsur-unsur modal sosial di kaji dari aspek bonding, bridging dan linking yang bersumber dari teoritis Woolcok (1999) Unsur-unsur itu sebagai sesuatu kekuatan yang digunakan dalam hubungan timbale balik antar lapisan sosial berdasarkan penguasaan lahan untuk mempertahankan fungsionalitas sosial. Konsep fungsionalitas itu mengacu pada cara individu atau kelompok mempertahankan keberfungsian sosial yang meliputi terpenuhi kebutuhan dasar, dapat menyelesaikan masalah dan melaksanakan peran sesuai dengan berbagai status yang melekat dalam diri seseorang.

2. Proses penelitian

Sebelum ke lapangan peneliti menelusuri berbagai pustaka dan menyusun rencana kegiatan dilapangan berupa identifikasi tahapan penelitian. Adapun tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

❖ Tahapan Pertama

Tahap pertama penelitian adalah memilih masyarakat sebagai objek penelitian. Masyarakat yang dipilih adalah warga transmigran di desa Marga Sakti. Hal-hal yang dilakukan sebagai entry point untuk turun ke lapangan

dengan baik dan sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti membentuk tim peneliti. Mereka lebih dahulu turun kelapangan untuk; (1) mengenali, menginventarisir sarana dan pra-saranan di lokasi penelitian; (2) melakukan kontak-kontak pendahuluan kepada pihak-pihak yang telah dipetakan sebagai informan dalam penelitian; (3) membangun relasi dengan elit desa serta warga desa. Dengan demikian peneliti menjadi fungsi berbagai peran agar dapat masuk dalam struktur aktivitas dari sasaran

❖ Tahapan Kedua

Pada tahapan ini kegiatan dilakukan peneliti adalah melakukan investigasi untuk menemukan dan mengumpulkan data yang diperlukan. Aktivitas peneliti mulai turun untuk bekerja dilapangan (*field work*). Sebelum turun kelapangan peneliti menyusun rencana peneliti. Peneliti membuat skala prioritas dan *scedule* penelitian. Peneliti juga harus pandai menentukan dimana tempat dan siapa yang nantinya di jadikan sebagai sumber informasi, sehingga penggalan data penelitian tidak menyimpang dari kajian penelitian.

Untuk mengantisipasi kebenaran data yang diperlukan maka peneliti harus melakukan pengecekan ulang (*cross chek*) dengan nara sumber lain untuk menguatkan kebenaran data yang didapat sebelumnya. Pengecekan ini dilaksanakan dengan menanyakan kembali dengan nara sumber. Pertanyaan yang diajukan kepada nara sumber dilakukan secara tidak terstruktur untuk memberi kenyamanan dan menyakinkan bagi nara sumber untuk memberikan

informasi yang benar. Data primer harus diutamakan karena data ini merupakan data yang menjadi argumen dalam penelitian. Pengumpulan data dipusatkan pada mereka berdasarkan luas penguasaan lahan. Beberapa di antara mereka dianggap sebagai informan kunci, dan kepada mereka dilakukan wawancara mendalam. Mereka memiliki pengetahuan banyak tentang pola penguasaan lahan dan dapat menjelaskan dinamika modal sosial dalam fungsionalitas sosial. Kedua informan kunci terdiri dari 5 orang yaitu (1) kepala desa, (2) Imam, (3) Pemangku adat, (4) wakil dari kelas berdasarkan lahan 9 orang. Total informan yang diperlukan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang.

❖ Tahap Ketiga

Penafsirkan data primer, tahap ini peneliti sudah mulai membawa dan menafsirkan dari data-data yang didapatkan (*reading, interpretation, and getting straight*). Pada tahapan ini data-data penelitian dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan mulai disusun secara sistematis. penelitian yang didapat.

❖ Tahap Keempat

Tahap ini peneliti melakukan cek ulang terhadap data primer yang diperoleh secara tuntas. Kemudian menganalisis data-data yang diperoleh dengan

menggunakan pendekatan secara teoritis yang relevan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi partisipasi, yaitu pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan cara peneliti ikut serta secara terbatas pada peristiwa sosial tertentu ke dalam objek yang diamati. Sebelum melakukan observasi membuat daftar list konsep yang akan diamati dengan cara mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh elit desa (kepala desa, sekretaris desa, ketua dusun, ketua adat, imam). Selanjutnya peneliti melakukan upaya parsipatif kepada unit rumah tangga yang berdasarkan penguasaan lahan.. Selain itu peneliti terlibat serta dalam urusan yang menyangkut aktifitas keseharian warga masyarakat terutama yang berkaitan dengan usaha yang berkaitan dengan fungsionalitas sosial. Observasi partisipasi dilengkapi dengan gambaran tentang kegiatan yang berkaitan dengan: (1) ketersediaan modal sosial yang berhubungan dengan bonding, bridging dan linking. (2) Bentuk modal sosial yang melekat dalam tataan struktur struktur penguasaan lahan. Selain itu memperhatikan sumber-sumber modal sosial yang potensial mendukung proses fungsionalitas warga dalam kehidupan sosial.

2. Catatan lapangan adalah pencatatan data dalam observasi dijadikan alat oleh peneliti dalam situasi pengamatan yang tidak berperan serta. Pengamatan dalam hal ini relatif bebas membuat catatan dan dilakukan pada saat sesudah pengamatan dilakukan.. Catatan tersebut berupa kategori dalam pola hubungan antar rumah tangga menurut luas penguasaan lahan, pada aktifitas melaksanakan peran, memecahkan masalah dan pemenuhan kebutuhan.
3. Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab diarahkan untuk mencapai tujuan penelitian. Wawancara pada penelitian kualitatif dilakukan untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami oleh individu, kelompok sesuai dengan tema kajian. Wawancara dilakukan; (1) secara informal yaitu proses wawancara didasarkan pada pertanyaan yang spontan dalam interaksi, (2) secara umum adalah wawancara peneliti dengan informan dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum yang berorientasi pada fenomena-fenomena yang diperlukan dan aspek-aspek yang harus dibahas, (3) wawancara standart terbuka.
4. Studi dokumen. Studi ini salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Bahan dokumenter berupa buku harian, catatan pribadi, surat, laporan.

Selain itu pengumpulan data diklasifikasi dua tahapan yaitu tahapan eksploratif dan deskriptif. Pengumpulan data dengan cara sistematis menurut konteks, sehingga terakumulasi informasi akurat dan holistik.

3.4. Analisa data

Analisis data sudah dimulai sewaktu di lapangan yaitu mulai dari proses klasifikasi dan kategori data antara apa yang diperoleh dari dokumentasi dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan yang berkaitan dengan komponen Modal sosial dalam fungsionalitas sosial dan pola penguasaan lahan.. Data dianalisis secara kualitatif melalui 3(tiga) proses yaitu reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan yang bergerak secara bolak balik diantara tiga proses tersebut dalam satu lingkaran yang bersifat interaktif.

Gambar 1. Komponen Analisa Interaktif



Proses analisis kualitatif ini adalah model analisis yang bukan satu persatu, melainkan secara integratif misalnya mengumpulkan data dulu baru

menganalisis dan menyajikan, tetapi pengumpulan data, kemudian data direduksi untuk disajikan dalam kesimpulan, tetapi kesimpulan dicek kembali ke data semula, sehingga tidak akan salah dalam menyimpulkan sesuatu. Mekanisme analisis ini bersifat komparatif yang bertujuan dapat merumuskan konsep dari *local genius* dalam memberi dukungan pada dinamika ketahanan ekonomi keluarga.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

1. Sejarah Desa

Kecamatan Padang Jaya pada awalnya merupakan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Kuro Tidur yang terdiri dari 9 unit dan terletak di kabupaten Bengkulu Utara. Pada saat ini kecamatan tersebut dibagi menjadi 7 (tujuh) desa yaitu desa Marga Sakti, Tanjung Harapan, Padang Jaya, Arga Mulya, Talang Tua, Sidomukti dan Lubuk Bayau. Jarak Kecamatan Padang Jaya \pm 25 km dari Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara (Arga Makmur) dan \pm 86 kilometer dari kota madya Bengkulu.

Penempatan transmigran dilokasi tersebut (desa Kuro Tidur) sebetulnya telah mulai dirintis pada masa Pra Pelita, yaitu pada tahun 1957 dengan penempatan 200 KK dan pada tahun 1968 sejumlah 170 KK. Kedua periode penempatan itu menemui kegagalan karena banyak gangguan keamanan, kesehatan, hama tanaman serta sulitnya hubungan ke lokasi, sehingga hampir seluruh transmigran meninggalkan lokasi dan mengembara di daerah lain di Bengkulu yang dirasa cukup aman bagi para transmigran. Pada periode Pelita III (1975-1979), di lokasi transmigrasi Kuro Tidur telah ditempatkan sebanyak 4.500 KK (20.114 jiwa) transmigran yang tersebar pada unit I-IX UPT Kuro Tidur (Tabel 4.1).

Lahan yang diperoleh untuk penyiapan pemukiman transmigrasi bersumber dari lahan marga yang dikepalai seorang pasirah dan lahan penduduk. Penyiapan pemukiman transmigrasi di Kuro Tidur merupakan era baru dalam kegiatan ketransmigrasian di Bengkulu mengingat volume kegiatan yang cukup besar dan merupakan deretan pemukiman transmigrasi yang berkesinambungan (lihat Tabel 4.1).

Disamping itu terdapat teknis penyiapan rumah-rumah transmigrasi yang dibangun dengan menggunakan kayu balok/gergajian (bukan kayu bulat), atap seng, lantai lahan dan penyiapan lahan yang dilaksanakan secara mekanis dengan bantuan alat-alat berat. Bersamaan dengan itu dibangun pula bendungan irigasi Air Lais yang dimulai tahun 1975/1979 dengan rencana potensi irigasi seluas 6.000 ha. Wilayah air irigasi tersebut meliputi daerah Kuro Tidur I, II, III dan sekitarnya, namun dalam realisasinya masih banyak KK transmigran yang tidak mendapatkan air untuk sawah.

Tabel 4.1. Penempatan Transmigran di Kuro Tidur Menurut Lokasi Penempatan Tahun 1975-1979.

Lo kasi	Thn	Daerah Asal Transmigran										Jlh KK
		Jatim		Jateng		DIY		Jabar		APPDT		
		KK	Jw	KK	Jw	KK	Jw	KK	Jw	KK	Jw	
1	75-77	152	665	236	1439	110	476	2	2	0	0	500
2	76-78	287	1337	0	0	0	0	190	947	0	0	477
3	76-78	111	552	248	1173	90	349	51	229	0	0	500
4	76-78	150	630	150	744	0	0	223	1087	0	0	523
5	76-78	200	902	166	878	0	0	134	627	0	0	500
6	77-79	0	0	500	1947	0	0	0	0	0	0	500
7	77-79	0	0	345	1423	0	0	0	0	156	777	501
8	77-79	0	0	500	1948	0	0	0	0	0	0	500
9	77-79	0	0	455	1809	0	0	0	0	44	163	499
Jlh		900	4860	2600	11361	200	825	600	2902	200	940	4500

Sumber : Pemda Tk.II Bengkulu Utara; KK = Kepala Keluarga Jw = Jiwa.

Pada periode pertama ditempatkan sebanyak 500 KK transmigran di lokasi Kuro Tidur unit I tahun 1977 dengan persiapan lahan 1250 ha, dimana setiap KK mendapatkan 1 hektar lahan sawah, 1/4 ha lahan rumah dan pekarangan dan 3/4 ha lahan kering. Kelebihan lahan seluas 250 ha pada periode ini dipersiapkan untuk areal desa dan sarana jalan. Penempatan transmigran periode II terdiri dari 2000 KK dilokasi Kuro Tidur unit II, III, IV, V dengan luas areal 4000 ha. Lokasi Kuro Tidur unit VI-IX merupakan wilayah penempatan transmigran yang berasal

dari waduk Gajah Mungkur Wonogiri, Jawa Tengah ditambah 10 persen penduduk setempat sesuai dengan Keppres I tahun 1978.

Unit pemukiman transmigrasi Kuro Tidur I-IV diserahkan kepada pemerintah daerah pada tanggal 2 Juni 1983 dan Kuro Tidur VI-IX diserahkan pada tanggal 14 Maret 1985, yang selanjutnya berkembang menjadi desa defmitif dengan nama desa sebagai berikut: Marga Sakti, Tanjung Harapan, Padang Jaya, Arga Mulya, Sido Mukti, Tanjung Tua, dan Lubuk Bayau Kecamatan Lais. Pada tahun 1992 desa-desa tersebut berada dibawah pemerintahan daerah Tingkat II Bengkulu utara, Kecamatan Padang Jaya, ibukotanya Padang Jaya.

Desa Marga Sakti merupakan kesatuan desa dan sejak tahun 2003 satuan wilayah pemerintah berubah menjadi 7 (tujuh) dusun dengan luas keseluruhan 3.375 Hektar. Pembagian wilayah Desa Marga Sakti dibagi menjadi 7 dusun yang diketuai oleh seorang Kepala Dusun (Kadun) dan masing-masing dusun terdiri dari beberapa RT dan tidak ada pembagian wilayah secara khusus begitu pula dengan keadaan Geografis.

2. Keadaan Geografis

2.1. Letak Geografis

Desa Marga Sakti berada di wilayah Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Utara terletak pada 101°35” dan 102°8” Bujur Timur dan 2° 15” dan 4° Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut; sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Sumatra Barat; sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kotamadia

Bengkulu; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Lokasi desa Marga Sakti terletak di wilayah dengan batas sebagai berikut; sebelah Barat berbatasan dengan Padang Jaya, sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Lindung Kabupaten Rejang Lebong, sebelah Timur berbatasan dengan desa Kuro Tidur dan sebelah Selatan berbatasan dengan desa Tanjung Harapan. Desa Marga Sakti, merupakan daerah dataran yang berada pada ketinggian ± 450 meter dari permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 3000 mm/tahun. Sedangkan di Kabupaten Bengkulu Utara dibagian pantai Barat dari Selatan ke Utara, kondisi lahannya berpasir dan merupakan dataran bergelombang dengan ketinggian 10-150 meter dari permukaan laut. Pada bagian Timur kondisi lahannya berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 541 meter dari permukaan laut. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Bengkulu Utara 2500 mm/tahun. Jadi, rata-rata curah hujan di Kecamatan Padang Jaya khususnya Desa Marga Sakti, lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata curah hujan di Kabupaten Bengkulu Utara.

2.2. Penduduk dan Penggunaan Lahan

Jumlah penduduk Desa Marga Sakti tahun 2016 banyak 1.670 KK yang terdiri dari 6.381 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tidak berbeda secara mencolok, melainkan antara penduduk laki-laki (3.145 jiwa) dan perempuan (3.236), rasionya berimbang.

Rasio pertumbuhan penduduk antara laki-laki dan perempuan kurang memberi efek ketimpangan yang kuat terhadap jumlah tenaga kerja laki-laki dan perempuan dalam usahatani. Namun kondisi ini memberi peluang yang sangat besar pada pola penguasaan lahan usahatani. Petani berlahan luas pada umumnya lahan digunakan untuk usahatani berupa perkebunan dan sawah. Sementara petani berlahan sempit penggunaan lahan untuk usahatani palawija.

Penggunaan lahan di Desa Marga Sakti menunjukkan bahwa 25,7 persen luas lahan di Desa Marga Sakti, digunakan untuk sawah dengan pengairan teknis dan setengah teknis, perkebunan negara dan perkebunan rakyat. Lahan sawah ini sebagian besar ditanami padi yang bisa dipanen satu sampai dua kali dalam satu tahun, lahan kering ditanami palawija (kedelai, nilam, kacang lahan, jagung dll).

Lahan perkebunan ditanami sawit dan karet. Lahan kering di desa ini terdiri dari lahan pekarangan dan bangunan (perkampungan) yaitu 11,5 persen serta lahan tegal dan kebun (45,5 persen). Lahan tegal dan kebun ini sebagian besar ditanami, ketela pohon dan kelapa. Lahan lainnya digunakan untuk kolam seluas 3,1 persen, sedangkan sisanya 13,5%, masih berupa lahan rawa, hutan negara, pangonan, jalan desa, dan lahan sisa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Distribusi Penguasaan Lahan

Luas penguasaan lahan rumah tangga transmigran ternyata telah mengalami struktur penguasaan lahan. Semula mereka menguasai lahan seluas 2 hektar setiap rumah tangga kemudian penguasaan lahan berubah menjadi terstruktur yaitu rumah tangga tak berlahan, berlahan sempit, berlahan sedang dan berlahan luas. Struktur penguasaan lahan cenderung membentuk gejala ketimpangan penguasaan lahan bagi rumah tangga petani. Rumah tangga petani berlahan luas relatif sedikit namun mereka mulai menguasai sumberdaya lahan 47 persen dari total lahan (lihat tabel 5.1).

Tabel 5.1. Distribusi Rumah Tangga Transmigran Menurut Luas Penguasaan Lahan di Desa Marga Sakti, Tahun 2017

Golongan Luas Lahan (hektar)	Pemilikan Lahan 2005-2010					Penguasaan Lahan 2011-2017				
	RT (N)	RT (%)	Luas (ha)	Luas (%)	Rataan (ha)	RT (N)	RT (%)	Luas (ha)	Luas (%)	Rataan (ha)
Tak berlahan	12	27	0	0	0.00	13	30	0.0	0	0
Sempit	8	18	6	11	0.50	9	22	5.4	16	0.25
Sedang	17	38	33.5	56	0.95	12	28	17.1	37	0.7
Luas	8	18	21.7	33	2.56	11	20	35.8	47	3.2
Total	45	100	54.3	100		45	100	60.4	100	
Rata-rata					0.62					0.57

Catatan : Distribusi pemilikan dan penguasaan lahan tahun 1977 dianggap sama/merata N=Jumlah rumah tangga; RT=Rumah tangga; %=Persentase; ha=hektar
Sempit 0,1-0,5 ha : sedang = 0,51-1,0 ha : Luas > 1,0 ha.

Rata-rata luas penguasaan lahan tiap rumah tangga cenderung makin menurun dari 0,62 hektar pada periode tahun 2005-2010 menjadi 0,51 hektar pada periode tahun 2011-2017. Hal ini berarti bahwa distribusi luas lahan usahatani tiap rumah tangga umumnya makin sempit dan dalam jangka panjang akan menimbulkan ketimpangan penguasaan bagi rumah tangga petani. Struktur penguasaan lahan pada rumah tangga petani mengakibatkan perbedaan dalam mengakses sumberdaya yang dibutuhkan untuk memelihara fungsionalitas sosial (pemenuhan kebutuhan, memecahan masalah dan melaksanakan peran). Secara struktur rumah tangga tak berlahan dan berlahan sempit mengalami kesulitan dalam pembaharuan unit-unit usaha pertanian dan rentan (*vulnerability*) terhadap ekonomi. Namun mereka secara realitas tetap mengembangkan kehidupan pada tatanan mempertahankan fungsionalitas sosial.

Artinya ada suatu sumberdaya lain diluar kekuatan penguasaan lahan yang dimiliki oleh rumah tangga petani pada di desa Marga Sakti, sehingga mereka dapat bertahan memelihara fungsionalitas sosial. Salah satu sumberdaya esensial yang dibutuhkan untuk memelihara fungsionalitas sosial adalah modal sosial .

5.2.Modal Sosial dalam Fungsionalitas Sosial Berdasarkan Luas Lahan

Kehidupan rumah tangga petani di desa Marga Sakti dianalisis secara *deskriptif* dimana kehidupan mereka dapat memelihara fungsionalitas sosial bersumber dari kekuatan modal sosial yang terkait dengan norma, nilai, jaringan sosial, rasa percaya, pertukaran timbale balik dan kohesifitas yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama. Komponen ini dapat

diklasifikasikan dalam tipe modal sosial yaitu *bonding* (ikatan), *bridging* (jembatan) dan *linking* (ikatan yang menyatukan masyarakat dalam posisi penting). Ada perbedaan modal sosial yang dimiliki oleh rumah tangga petani berdasarkan penguasaan lahan. Perbedaan tersebut ada pada tipe modal sosial berupa aspek sumberdaya *linking*. Ilustrasi elemen-elemen tipe modal sosial berupa *linking* yaitu berupa interaksi dengan pihak pemerintah maupun daerah melalui aktifitas organisasi yang biasanya cenderung diakses oleh rumah tangga petani lahan luas. Mereka lebih berpartisipasi secara penuh dalam proses pengambilan keputusan yang berbasis pada kekuatan masyarakat untuk tetap memelihara fungsionalitas sosial di setiap struktur dalam penguasaan lahan.

5.2.1. Modal Sosial Rumah Tangga Tak Berlahan dan Berlahan Sempit

Modal sosial dalam bentuk tipe *bonding* pada rumah tangga petani tak berlahan dan berlahan sempit adalah berupa ikatan yang memfasilitasi tindakan petani memelihara fungsionalitas sosial yaitu terkait pada norma-norma aksi kolektif. Norma ini mengedepankan kebersamaan memperoleh sumber-sumber ekonomi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aksi kolektif mengacu pada penambahan tenaga kerja misalnya membantu biaya produksi rumah tangga yang mengelola lahan dengan status sewa pada berbagai aktifitas yang memiliki nilai ekonomi. Mereka menyadari bahwa kelangkaan modal ekonomi yang dimiliki berdampak terganggunya fungsionalitas sosial terutama kecukupan pemenuhan kebutuhan dasar.

Kolektifitas antara rumah tangga strata tak berlahan dan berlahan sempit diperoleh melalui jaringan sosial dan percaya antar sesama berdasarkan kekerabatan dan daerah asal. Jaringan ini adalah bentuk dari tipe modal sosial *bridging* yang menjembatani mereka untuk mengatasi masalah yang berhubungan erat dengan fungsi kedua dari fungsionalitas sosial. Penyelesaian masalah baik berupa material maupun non material seperti biaya sekolah, sakit, kredit dan moral, saling menghargai. Hubungan antar kelompok strata sosial

diakui bahwa hubungan dalam satu hirarki memiliki pertukaran sangat kuat untuk mengakses sumberdaya dibandingkan dengan kelompok di luar komunitas.

Sementara tipe modal sosial yang berupa *linking* pada strata ini cenderung diikat oleh kesatuan posisi dalam pengembangan peran sebagai warga masyarakat seperti mereka mengidentifikasi sebagai kelompok-kelompok swadaya saling membantu secara aktif dan memberikan kontribusi membangun infrastruktur yang ada pada masyarakat atau membantu individu atau keluarga di desa Marga Sakti. Tujuan tindakan mereka adalah untuk pengembangan perannya dalam mempertahankan unsur fungsionalitas sosial agar mereka diakui dan dapat berpartisipasi untuk menjamin kelangsungan hidup.

Modal sosial dalam melaksanakan fungsionalitas sosial berdasarkan strata ini berbentuk, aksi kolektifitas (*bounding*), yang memiliki nilai ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jaringan sosial merupakan unsur modal sosial yang diklasifikasikan sebagai *bridging* adalah berdasarkan kekerabatan dan daerah asal atau tempat tinggal yang menguatkan mereka untuk saling percaya. Hal ini diwujudkan dalam sistem pertukatan tenaga kerja seperti tolong menolong terutama dalam memecahkan masalah ekonomi dan non ekonomi kegiatan. Tipe modal sosial berupa *linking* pada strata ini lebih menguatkan posisi sebagai kelompok swadaya secara aktif seperti bergotong royong, kebiasaan silaturahmi, dan saling menghargai. Unsur-unsur tipe modal sosial ini merupakan sumberdaya yang sangat penting dalam melaksanakan fungsionalitas sosial.

Kesanggupan rumah tangga petani transmigran melaksanakan fungsionalitas sosial merupakan sumberdaya yang diperoleh melalui kekuatan dan ketersediaan modal sosial yang ada dalam kehidupan sosial mereka. Modal sosial dipandang sebagai kaulitas interaksi dalam mengalokasikan sumberdaya melalui pola hubungan yang menjadi bagian dari masyarakat.

Berarti modal sosial diakses sebagai tujuan tindakan oleh kelompok dalam satuan masyarakat berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh kekuatan potensi yang dimiliki pada jenjang hirarki yang diidentifikasi berupa strata .

Rumah tangga petani berlahan sedang dan luas memberikan “*capacity building*” pada berbagai kemampuan teknis dalam melaksanakan fungsionalitas sosial.

5.2.2. Modal Sosial Rumah Tangga Berlahan Sedang dan Berlahan Luas

Rumah Tangga berlahan sedang dan berlahan luas dikategorikan sebagai strata secara sosial adalah kelas atas. Strata sosial ini berkorelasi dalam mengakses modal sosial sebagai tujuan tindakan unruk melaksanakan fungsionalitas sosial. Modal sosial dalam bentuk tipe *bonding* pada strata ini lebih cenderung terikat pada norma-norma yang berlandaskan kepedulian sosial dan nilai-nilai yang berdimensi sosial. Bentuk kepedulian sosial merupakan kesadaran individu dalam satuan kelompok yang tumbuh terus menerus dalam hubungan sosial antar strata yang ada di desa Marga Sakti. Kepedulian sosial diwujudkan dalam bentuk kerja sama untuk saling membantu antar warga agar tidak banyak mengalami gangguan ketika melaksanakan fungsionalitas sosial. Kekuatan norma ini menghubungkan sumberdaya yang tersedia pada tingkat lokal dan melayani kepentingan setiap warga masyarakat terutama kecukupan pemenuhan kebutuhan dasar. Bentuk kepedulian pada strata ini adalah membangun irigasi tertier agar setiap warga berkecukupan air disaat pengelolaan sawah dan menjamin keamanan warga.

Kepedulian sosial antara rumah tangga strata berlahan sedang dan luas diikuti oleh nilai-nilai sosial berupa seperangkat kepercayaan yang disosialisasikan melalui nilai agama. Pemahaman meraka bahwa segala perilaku diketahui oleh Sang Pencipta. Konsekuensi dari hal tersebut tercipta kondisi masyarakat yang aman dan terjaga hak milik warga. Dengan demikian masyarakat mampu mengendalikan lingkungan yang memiliki efek pada kemudahan pemenuhan kebutuhan dasar dan mengatasi masalah, sehingga mendukung fungsionalitas sosial bagi masyarakat.

Mekanisme kepedulian sosial membentuk jaringan sosial berdasarkan tempat tinggal seperti pertetanggaan, kekeluargaan yang bersifat jangka panjang dan

diikuti oleh tanggungjawab antar sesama. Jaringan yang dijembatani berdasarkan tempat tinggal merupakan tipe modal sosial bridging. Tipe modal sosial ini lebih menekankan pada penguatan warga agar mampu mengatasi dan mengurangi masalah yang dihadapi. Kemampuan warga mengatasi masalah dipahami bagi warga akan mengurangi konflik sehingga fungsionalitas sosial warga pada level mekanismenya dapat mengambil peran sosial termanifestasikan dalam memfasilitasi partisipasi membangun integrasi sosial.

Sementara tipe modal sosial berupa *linking* pada strata ini cenderung diikat oleh prinsip-prinsip pengembangan kelompok sosial yang dilakukan oleh elite desa seperti perangkat desa, imam, ketua adat. Para elite desa memfasilitasi keterlibatan seluruh warga untuk berpartisipasi merespon kebutuhan masyarakat yang sifatnya relatif kondisional seperti membuat koperasi simpan pinjam, membantu pendidikan di sekolah, pengajian rutin. Pelaksanakan peran di strata ini tidak hanya bersifat horizontal melainkan juga bersifat vertikal. Artinya tujuan tindakan antar warga masyarakat untuk melaksanakan fungsionalitas sosial melibatkan warga transmigran di desa Marga Sakti yang memiliki sumberdaya dibutuhkan tidak bersifat homogen melainkan bersifat heterogen dari berbagai strata sosial.

Pola hubungan yang sama antara strata tak berlahan dan berlahan sempit dengan strata berlahan sedang dan berlahan luas adalah sama-sama percaya, kepada elite desa dan kelompok sosial yang ada di desa Marga untuk pengurus lingkungan melalui pola tolong menolong. Kebiasaan tolong menolong antara lain tampak bahwa mereka memiliki kebiasaan saling mengantar makanan. Kebiasaan saling mengantar makanan cenderung lebih banyak dilakukan oleh strata atas. Namun frekuensi tolong menolong lebih besar berasal dari strata tak berlahan dan berlahan sempit dibandingkan dengan strata berlahan luas.

5.2.3 Pola Pembentukan Modal Sosial

Hasil analisis melalui indept interview bahwa modal sosial dimulai dari lingkup internal yaitu keluarga dan kerabat. Mereka melakukan aktivitas dalam proses pelaksanaan fungsionalitas sosial bersama kakak kandung dan ipar dan dalam hubungan mereka menjalin kerjasama sebagai mitra kerja dalam usahatani maupun berdagang. Hubungan antar anggota keluarga menunjukkan hubungan kerja yang baik sehingga menimbulkan kepercayaan (*trust*) dan kohesifitas yang kuat. Rumah tangga menjalin kerjasama pada prinsip utama adalah memelihara fungsionalitas sosial. Keterlibatan anggota keluarga dalam satuan rumah tangga tampak pada keterlibatan melaksanakan aktivitas kerjasama tidak hanya beranggotakan bersifat keluarga inti tetapi juga melibatkan keluarga luas seperti melibatkan bapak mertua, ibu mertua, nenek dan pihak-pihak keluarga besan.

Modal sosial yang dimulai dari keluarga dan kerabat berkembang secara horisontal dan vertikal. Secara vertikal mereka menjalin hubungan dan berinteraksi dengan kelompok yang memiliki sumberdaya seperti kepala desa, imam, tokoh agama dan tokoh adat serta kelompok yang menguasai mekanisme pasar (toke karet, sawit, dan barang bos atau pemilik order dan yang sering dilakukan adalah dengan mengambil simpatik pemilik manisan). Mereka menjaga dan membangun modal sosial dengan menciptakan apa yang sudah disepakati dan memberikan kepercayaan yang antar kelompok tersebut. Hak ini lambat laun mendapatkan kepercayaan tinggi untuk mengelola usaha keluarga baik usahatani maupun non usahatani.

Modal sosial yang dikembangkan nampak bermanfaat saat mendukung terpeliharanya fungsionalitas sosial antar rumah tangga transmigran. Mereka memiliki modal fisik untuk berusaha dan bekerja kerja disektor pertanian dan non pertanian, akan sanggup dikerjakan walaupun kapasitas usaha tidak sesuai. Kondisi seperti ini yang dilakukan adalah mengajak anggota keluarga untuk mengerjakan sama-sama dengan penggabungan kapasitas sehingga bisa memenuhi syarat mengerjakan pekerjaan. Artinya masalah pendidikan dan kemampuan atau skill yang rendah atau human capital yang rendah dapat lebih optimal apabila memiliki modal sosial sehingga semua jenis pekerjaan yang diterima dapat dikerjakan dengan baik dan memberikan efek pada unsur dinamika fungsionalitas sosial dalam rumah tangga.

Modal sosial yang dibangun dalam keluarga dan kerabat menjadi sumber awal berkembang modal sosial tipe bonding, bridging dan linking. Bonding modal sosial yang didapat dari keluarga dan kerabat sebagai modal sosial internal. Pada umumnya hasil interaksi dengan antar anggota rumah tangga berkembang karena adanya bonding modal sosial dari keluarga. *Bonding* modal sosial yang dimiliki oleh rumahtangga transmigrasi berkembang menjadi *bridging* modal sosial khusus hasil interaksi antar keluarga atau rumah tangga transmigran. *Bridging* modal sosial yang dimiliki yang menghasilkan *human capital* antara lain penambahan pengetahuan penambahan ketrampilan, *supply* tenaga kerja, dan peluang berusaha dan bekerja. Dengan demikian kualitas *bonding* dan *bridging* modal sosial akan menghasilkan

linking modal sosial bagi rumah tangga transmigran dalam bentuk penguatan kelompok yang berkorelasi dalam melaksanakan fungsionalitas sosial.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Luas penguasaan lahan rumah tangga transmigran ternyata telah mengalami perubahan struktur penguasaan lahan yaitu semula lahan yang dikuasai oleh mereka sebanyak 2 hektar berubah menjadi terstruktur yaitu rumah tangga tak berlaha, berlahan sempit, berlahan sedang dan berlahan luas. Rumah tangga berdasarkan luas penguasaan lahan memiliki kekuatan unruk melaksanakan fungsionalitas sosial, salah satu kekuatan itu berupa modal sosial.

Rumah tangga tak berlahan dan berlahan sempit memiliki *bouding*, modal sosial dalam melaksanakan fungsionalitas sosial berbentuk, aksi kolektifitas yang memiliki nilai ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar. *bridging* modal sosial adalah jaringan sosial berdasarkan kekerabatan dan daerah asal atau tempat tinggal yang menguatkan mereka untuk saling percaya. Tipe modal sosial berupa *linking* berupa kelompok swadaya secara aktif seperti bergotong royong, kebiasaan silaturahmi, dan saling menghargai.

Rumah tangga berlahan sedang dan berlahan luas Modal sosial tipe *bouding* terikat pada norma-norma yang berlandaskan kepedulian sosial dan nilai-nilai yang berdimensi sosial. Kepedulian sosial diwujudkan dalam bentuk kerja sama untuk saling membantu antar warga seperti membangun irigasi tertier agar setiap warga berkecukupan air disaat pengelolaan sawah dan menjamin keamanan warga.

Jaringan yang dijembatani berdasarkan tempat tinggal merupakan tipe modal sosial *bridging* kesanggupan mereka mengambil peran sosial dalam memfasilitasi partisipasi membangun integrasi sosial. Tipe modal sosial berupa *linking* berbentuk prinsip-prinsip pengembangan kelompok sosial yang dilakukan oleh elite desa seperti perangkat desa, imam, ketua adat seperti membuat koperasi simpan pinjam, membantu pendidikan di sekolah, pengajian rutin.

2. Saran

Pemberdayaan masyarakat transmigrasi bidang sosial budaya dan politik agar mampu mempertahankan eksistensi fungsionalitas sosial adalah membangun unsur-unsur modal sosial agar mampu membangun keseimbangan kehidupan sosial. Unsur modal sosial dilibatkan terutama dikuatkanj dalam model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan yang berbasis masyarakat atau komunitas.

VII. Daftar Pustaka

- Anonim
2010 Rencana Teknis Pembinaan Unit Pemempatan Transmigran Pelebai Kabupaten Rejang Lebong, Dinas Transmigrasi dan PPH Provinsi Bengkulu.
- Budhi Wibbawa dkk
2010 Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Bourdieu, Pierre
1986 The Form of Capital in Handbook of Theory and Research for The Sociology of Education. Edited by John Richardson. New York, Greenwood Press.
- Coleman, James S.
1990 Foundations of Social Theory, Cambrige, MA, Harvard University Press.
- Coleman, James S.
1988 Dasar-dasar Teori Sosial, Foundation of Social Theory. Bandung, Nusa Media
- Dasgupta, Partha. And Seregredin, Ismail
1999 Social Capital. A Multifaceted Perspective. Washinton, D.C, Word Bank.
- Dewanta,A.S.,
(2015) Epilog: Agenda Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia, Aditya Media.
- Fukuyama,F
1995 Trust: The Social Vaalue aand The Creation of Prosperity. New York, Free Press.

Hardjono, Joan

1990 Lahan Pekerjaan dan Nafkah di Pedesaan Jawa Barat, UGM Press, Yogyakarta.

Kano, Hiroyosshi

1987 Pemilikan Lahan dan Kesempatan Kerja, dalam Buku Laporan Sementara Survey Sosial Ekonomi Desa, Daerah Bantul Yogyakarta, Kerja Sama Institute of Developing Economic dan LIPI serta FE UGM Yogyakarta.

Kustadi

1984 Masalah Lahan di daerah Transmigrasi dalam Tim Peneliti UKSW, Transmigran dari daerah asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman, Rajawali, Jakarta.

Nasikun dan Lambang Triyono

1992 Proses Perubahan Sosial di Daerah Jawa: Teknologi Surplus Produksi dan Pergeseran Okupasi, FISIP UGM, Yogyakarta.

Portes, Alenjaro

1997 Social Capital: its Origins and Application in Modern Sociology. New Jersey, Annual Review Social.

Putnam, R.

1993 The Prosperous Community Social Capital and Publik Life. Italy, Princeton University Press.

Soekanto Suryono

1987 Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat, Rajawali, Jakarta.

Sulastomo, Bambang

1994 Lapisan Atas Desa dalam Pembangunan Industri Pembangunan di Indonesia, Yayasan Bina Darma, Salatiga.

Tjondronegoro.SPM, dan Gunawan Wiradi

1984 Dua Abad Penguasaan Lahan Pertanian di Desa Jawa dari Masa ke Masa, Obor Indonesia, Jakarta.

Woolcock, M

1998 Social Capital and Economic Development : Towartds a Theoretical Synthesis and Policy framework, Theory and Sociaty, forthcoming. The Word Bank Research Observer

IV. Jadwal Pelaksanaan dan Tahap Penelitian

No	Nama Kegiatan	Bulan ke-1				Bulan ke-2				Bulan ke-3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan:												
	a. Penyusunan Proposal	■											
	b. Seminar Proposal		■										
	c. Perizinan			■									
2	Pelaksanaan:												
	a. Observasi					■							
	b. Wawancara						■	■					
	c. FGD							■	■				
3	Pelaporan:												
	a. Tabulasi dan analisis data lapangan									■	■	■	
	b. Seminar hasil												■
	c. Penyusunan laporan akhir												■
	d. Publikasi												■

